

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

LAMPIRAN XXI

PERATURAN PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 97 TAHUN 2016
TENTANG
RINCIAN ANGGARAN
PENDAPATAN DAN BELANJA NEGARA
TAHUN ANGGARAN 2017

RINCIAN PEMBIAYAAN ANGGARAN



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

LAMPIRAN XXI
RINCIAN PEMBIAYAAN ANGGARAN

(dalam ribuan rupiah)

NO	URAIAN	JUMLAH
1	Pembiayaan Utang	384.690.492.775
1.1	Surat Berharga Negara (Neto)	399.992.586.000
1.2	Pinjaman (Neto)	-15.302.093.225
1.2.1	Pinjaman Dalam Negeri (Neto)	1.486.800.000
1.2.1.1	Penarikan Pinjaman Dalam Negeri (Bruto)	2.500.000.000
1.2.1.2	Pembayaran Cicilan Pokok Pinjaman Dalam Negeri	-1.013.200.000
1.2.2	Pinjaman Luar Negeri (Neto)	-16.788.893.225
1.2.2.1	Penarikan Pinjaman Luar Negeri (Bruto)	48.293.174.075
1.2.2.1.1	Pinjaman Tunai	13.300.000.000
1.2.2.1.2	Pinjaman Kegiatan	34.993.174.075
1.2.2.1.2.1	Pinjaman Kegiatan Pemerintah Pusat	24.921.745.787
1.2.2.1.2.1.1	Pinjaman Kegiatan Kementerian Negara/Lembaga	23.905.481.787
1.2.2.1.2.1.2	Pinjaman Kegiatan Diterushibahkan	1.016.264.000
1.2.2.1.2.2	Pinjaman Kegiatan kepada BUMN/Pemda	10.071.428.288
1.2.2.2	Pembayaran Cicilan Pokok Pinjaman Luar Negeri	-65.082.067.300
2	Pembiayaan Investasi	-47.488.928.936
2.1	Investasi Kepada BUMN	-4.000.000.000
2.1.1	PMN kepada PT Penjaminan Infrastruktur Indonesia (Persero)	-1.000.000.000
2.1.2	PMN kepada PT Sarana Multigriya Finansial (Persero)	-1.000.000.000
2.1.3	PMN kepada PT Sarana Multi Infrastruktur (Persero)	-2.000.000.000
2.2	Investasi Kepada Lembaga/Badan Lainnya	-6.800.000.000
2.2.1	PMN kepada Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia (LPEI)	-3.200.000.000
2.2.2	PMN kepada BPJS Kesehatan untuk Program DJS Kesehatan	-3.600.000.000
2.3	Investasi Kepada BLU	-34.700.000.000
2.3.1	Dana Bergulir	-10.700.000.000
2.3.1.1	Pusat Pengelolaan Dana Pembiayaan Perumahan (PPDPP)	-9.700.000.000
2.3.1.2	Lembaga Pengelola Modal Usaha Kelautan dan Perikanan (LPMUKP)	-500.000.000
2.3.1.3	Lembaga Pengelola Dana Bergulir (LPDB) KUMKM	-500.000.000

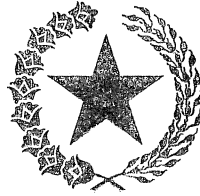


PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

LAMPIRAN XXI
RINCIAN PEMBIAYAAN ANGGARAN

(dalam ribuan rupiah)

NO	URAIAN	JUMLAH
2.3.2	Dana Pengembangan Pendidikan Nasional (DPPN)	-2.500.000.000
2.3.3	Lembaga Manajemen Aset Negara (LMAN)	-20.000.000.000
2.3.4	Pusat Investasi Pemerintah	-1.500.000.000
2.4	Investasi kepada Organisasi/Lembaga Keuangan Internasional/Badan Usaha Internasional	-1.988.928.936
2.4.1	Islamic Development Bank (IDB)	-75.923.436
2.4.2	The Islamic Corporation for the Development of Private Sector (ICD)	-41.030.500
2.4.3	International Fund for Agricultural Development (IFAD)	-39.900.000
2.4.4	International Development Association (IDA)	-44.289.000
2.4.5	Asian Infrastructure Investment Bank (AIIB)	-1.787.786.000
3	Pemberian Pinjaman	-6.409.651.268
3.1.	Pinjaman kepada BUMN/Pemda/Lembaga/Badan Lainnya	-6.409.651.268
3.1.1.	Pinjaman kepada BUMN/Pemda (Neto)	-6.409.651.268
3.1.1.1.	Pinjaman kepada BUMN/Pemda (Bruto)	-10.071.428.288
3.1.1.1.1	PT Perusahaan Listrik Negara (Persero)	-5.153.181.609
3.1.1.1.2	PT Pertamina (Persero)	-1.020.788.173
3.1.1.1.3	PT Penjaminan Infrastruktur Indonesia (Persero)	-12.576.467
3.1.1.1.4	PT Sarana Multi Infrastruktur (Persero)	-5.000.000
3.1.1.1.5	Pemerintah Provinsi DKI Jakarta	-3.866.196.499
3.1.1.1.6	Pemerintah Provinsi Aceh	-13.685.540
3.1.1.2	Penerimaan Cicilan Pengembalian Pinjaman kepada BUMN/Pemda	3.661.777.020
4	Kewajiban Penjaminan	-924.124.000
4.1	Penugasan Percepatan Pembangunan Infrastruktur Nasional	-721.124.000
4.1.1	Percepatan Pembangunan Pembangkit Tenaga Listrik yang Menggunakan Batubara	-449.679.000
4.1.2	Percepatan Penyediaan Air Minum	-1.137.000
4.1.3	Penjaminan Infrastruktur dalam Proyek Kerjasama Pemerintah dengan Badan Usaha yang Dilakukan Melalui Badan Usaha Penjaminan Infrastruktur	-209.867.000



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

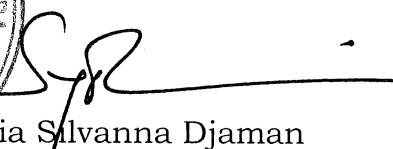
LAMPIRAN XXI
RINCIAN PEMBIAYAAN ANGGARAN

(dalam ribuan rupiah)

NO	URAIAN	JUMLAH
4.1.4	Pembiayaan Infrastruktur Melalui Pinjaman Langsung dari Lembaga Keuangan Internasional kepada Badan Usaha Milik Negara	-21.067.000
4.1.5	Percepatan Pembangunan Jalan Tol di Sumatera	-39.374.000
4.2	Penugasan Penyediaan Pembiayaan Infrastruktur Daerah kepada BUMN	-203.000.000
5	Pembiayaan Lainnya	300.000.000
5.1	Hasil Pengelolaan Aset	300.000.000
	JUMLAH TOTAL	330.167.788.571

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,
ttd.
JOKO WIDODO

Salinan sesuai dengan aslinya
KEMENTERIAN SEKRETARIAT NEGARA
REPUBLIK INDONESIA

Asisten Deputi Bidang Perekonomian
Deputi Bidang Hukum dan Perundang-undangan,

Lydia Silvanna Djaman

